

Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat Widya Wiwaha

DOI: <https://doi.org/10.32477/jpm.v4i2>

Published: 2026-06-05

Articles

PENINGKATAN LITERASI INVESTASI MAHASISWA MELALUI SEMINAR EDUKASI PASAR MODAL

Juli Riyanto Tri Wijaya, Syarif Hidayatullah, Alip Toto Handoko, Aditya Dwi Prihamono, Rizky Kurniawan60-70

📄 ARTIKEL

STORYTHOMIC TOURISM DALAM PENGENALAN OBYEK WISATA BAGI PELAJAR DI KABUPATEN SLEMAN

Studi Kasus Pada SMP IT Baitussalam, Pulerejo, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Annida Khoiriani, Eko Martanto, Arif Tri Winarso, Christina Enny, Rina Mawarti Muji Astuti, Erwin Budi Setyawan, Andri Yuni Astuti, Desta Ardiansah, Gilang Gerin Berlian Abel Putra, Zainul Arifin, Ulil Fikri, Galang Herdano Bramastiko, Galih Putra Risnawan, Muhammad Arwindo Putra Bagaskara71–76

📄 ARTIKEL

PENGUATAN MANAJEMEN KEUANGAN STRATEGIS BANK SAMPAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Sulastiningsih Sulastiningsih, Ratih Tiyas Pratiwi, Muhammad Awal Satrio Nugroho, Achmad Tjahjono, Yunita Fitri Wahyuningtyas77-87

📄 ARTIKEL

PENINGKATAN LITERASI AKUNTANSI KEUANGAN PRIBADI MELALUI SEMINAR EDUKATIF BAGI MAHASISWA IKATAN LEMBAGA MAHASISWA PSIKOLOGI INDONESIA (ILMPI) WILAYAH IV YOGYAKARTA PADA TAHUN 2026

Eka Fitri Mulyani, Rizki Oktavianto88–93

📄 ARTIKEL

PENDAMPINGAN PENGELOLAAN BUDIDAYA LELE DAN TAMAN SYURGA BERBASIS AQUAPONIK DENGAN ME-RECYCLE AIR WUDLU UNTUK MENINGKATKAN GIZI SISWA SLB YAPENAS DI PEDUKUHAN PRINGWULUNG, CONDONGCATUR, DEPOK SLEMAN DIY

Muhammad Robi’ Nurwahyudi, Muhammad Mathori, John Suprihanto, Mahasiswa Manajemen Strategik 25.1.K94-99

📄 ARTIKEL

PERENCANAAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA BAGI PENGELOLA KEUANGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI DALAM MENDUKUNG EFISIENSI BELANJA DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Zulkfili Zulkfili100–119

📄 ARTIKEL

Make a Submission
INFORMATION
For Readers
For Authors
For Librarians
EDITORIAL POLICIES
Publication Ethic
Editorial Team
Reviewer
Focus and Scope
Author Guidelines
Peer Review Process
Publication Frequency
Publication fee
Plagiarism Checker
Copyright Notice
Open Access Policy
Ethical Statement
Publisher
ARTICLE TEMPLATE



ISSN

eISSN 3026-6297

TOOLS

zotero

Mendeley

INDEXING LIST



Support By



VISITORS

00033994

PERENCANAAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA BAGI PENGELOLA KEUANGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI DALAM MENDUKUNG EFISIENSI BELANJA DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Zulkifli

Prodi Akuntansi, STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta, Indonesia - email: zulstieww@gmail.com

Ringkasan

Pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dituntut menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas melalui penganggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting). Namun, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai kendala, antara lain belum optimalnya penyusunan indikator kinerja, keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, serta kemampuan pengelola keuangan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berbasis hasil. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kompetensi pengelola keuangan PTN dalam menyusun perencanaan penganggaran berbasis kinerja guna mendukung efisiensi belanja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Kegiatan dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) pada 8–9 Juli 2026 di Yogyakarta dengan melibatkan 8 peserta yang berasal dari unsur pengelola keuangan, pejabat perencana, pejabat pembuat komitmen, bendahara, pimpinan unit kerja, dan tenaga kependidikan PTN. Metode pelaksanaan meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, simulasi penyusunan indikator SMART, penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), penyusunan RKA berbasis kinerja, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta yang ditandai dengan kenaikan nilai rata-rata pre-test dari 58,0 menjadi 87,3 pada post-test, atau meningkat sebesar sekitar 50,5%. Selain itu, tingkat ketercapaian sasaran kegiatan menunjukkan kehadiran peserta sebesar 96%, kemampuan menyusun indikator SMART mencapai 91%, kemampuan menyusun RKA berbasis kinerja sebesar 89%, partisipasi diskusi mencapai 97%, dan tingkat kepuasan peserta sebesar 94%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa bimbingan teknis mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam menerapkan penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian output dan outcome. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung penguatan tata kelola keuangan PTN, meningkatkan efisiensi belanja, serta memperkuat akuntabilitas kinerja sesuai prinsip good governance.

Kata kunci: Penganggaran Berbasis Kinerja, Perguruan Tinggi Negeri, Efisiensi Belanja, Akuntabilitas Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran.

Summary

State Universities (PTN) are required to manage public finances based on the principles of efficiency, effectiveness, transparency, and accountability through Performance-Based Budgeting (PBB). However, several challenges remain in practice, including suboptimal performance indicator formulation, limited integration between planning and budgeting, and insufficient

capacity among financial managers to prepare results-oriented Work Plans and Budgets (Rencana Kerja dan Anggaran/RKA). This community service program aimed to enhance the competencies of PTN financial managers in developing performance-based budgeting plans to support expenditure efficiency and strengthen performance accountability.

The program was conducted through a Technical Guidance Program held on July 8–9, 2026, in Yogyakarta, involving eight participants representing financial management personnel, planning officers, commitment-making officers, treasurers, unit heads, and administrative staff at State Universities. The program employed a participatory approach consisting of instructional sessions, interactive discussions, case studies, simulations for developing SMART performance indicators, formulation of Key Performance Indicators (KPIs), preparation of performance-based RKA, and evaluation through pre-tests and post-tests.

The evaluation results demonstrated an improvement in participants' competencies, as indicated by an increase in the average pre-test score from 58.0 to 87.3 in the post-test, representing an improvement of approximately 50.5%. In addition, the achievement of program targets was reflected in a 96% attendance rate, 91% competency in developing SMART indicators, 89% competency in preparing performance-based budgets, 97% participation in discussions, and a 94% participant satisfaction rate. These findings indicate that the technical guidance program effectively enhanced participants' understanding and practical skills in implementing performance-based budgeting oriented toward measurable outputs and outcomes. The program is expected to contribute to strengthening financial governance in State Universities, improving expenditure efficiency, and enhancing performance accountability in accordance with good governance principles.

Keywords: *Performance-Based Budgeting, State Universities, Expenditure Efficiency, Performance Accountability, Work Plans and Budgets.*

1. Pendahuluan

Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) di Indonesia didukung oleh berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur penyusunan RKA-K/L, pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan standar biaya. Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa setiap alokasi anggaran harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja yang ingin dicapai sehingga penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Reformasi pengelolaan keuangan negara telah mengubah paradigma penyusunan anggaran pemerintah dari pendekatan tradisional (*traditional budgeting*) menuju *Performance-Based Budgeting* yang berorientasi pada pencapaian hasil. Paradigma tersebut menempatkan anggaran bukan sekadar sebagai alat pengalokasian dana, tetapi sebagai instrumen strategis untuk mencapai sasaran pembangunan yang terukur melalui hubungan antara input, aktivitas, *output*, *outcome*, dan impact. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara sekaligus memperkuat akuntabilitas publik ([17]; [10]; [11]; [15]).

Dalam sektor pendidikan tinggi, penerapan PBK menjadi semakin penting karena Perguruan Tinggi Negeri (PTN) merupakan institusi yang mengelola dana publik untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggaran yang bersumber dari APBN, PNPB, hibah maupun kerja sama perlu diarahkan pada pencapaian luaran dan hasil yang dapat diukur melalui indikator kinerja yang relevan, seperti peningkatan kualitas lulusan, publikasi ilmiah, inovasi penelitian, akreditasi

institusi dan peningkatan kualitas pelayanan akademik. Di sisi lain, dinamika kondisi fiskal nasional mendorong pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi belanja negara. Keterbatasan ruang fiskal mengharuskan PTN melakukan penyesuaian prioritas anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kondisi tersebut menuntut pengelola keuangan PTN memiliki kemampuan menyusun anggaran secara lebih selektif, berbasis prioritas, dan berorientasi pada penciptaan nilai tambah (*value for money*). Meskipun konsep PBK telah diterapkan, dalam praktiknya masih terdapat persoalan dalam mengintegrasikan dokumen perencanaan strategis dan penganggaran. Renstra, Renja, RKA, DIPA, dokumen monitoring dan evaluasi, serta LKjIP belum sepenuhnya terhubung dalam satu alur manajemen kinerja yang konsisten. Kondisi tersebut menyebabkan keterkaitan antara sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), program, kegiatan, *output*, *outcome* dan alokasi anggaran belum selalu berjalan secara sistematis. Dengan demikian, keberadaan dokumen secara administratif belum secara otomatis menjamin bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar dapat ditelusuri keterkaitannya dengan target kinerja. Permasalahan tersebut juga berpotensi menyebabkan orientasi pengelolaan anggaran lebih menekankan penyerapan anggaran dibandingkan pencapaian hasil.

Data hasil simulasi dalam kegiatan Bimtek memperkuat gambaran tersebut. Dari dua kelompok peserta yang melakukan penyusunan RKA berbasis kinerja, masih ditemukan indikator yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip SMART, *outcome* yang masih sulit diukur, serta hubungan antara *output* dan IKU yang belum konsisten. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan integrasi perencanaan dan penganggaran bukan hanya berkaitan dengan keberadaan dokumen, tetapi juga dengan kemampuan teknis sumber daya manusia dalam menerjemahkan sasaran strategis ke dalam indikator, program, kegiatan, *output*, *outcome* dan alokasi anggaran.

Permasalahan tersebut menjadi semakin relevan dalam konteks transformasi digital pengelolaan anggaran melalui penerapan *e-Planning*, *e-Budgeting* dan *dashboard monitoring*. Sistem digital dapat mempercepat dan meningkatkan keterintegrasian proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, tetapi efektivitasnya tetap sangat bergantung pada kualitas data, konsistensi indikator dan kompetensi sumber daya manusia yang mengelolanya. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek) yang tidak hanya memberikan pemahaman konseptual mengenai PBK, tetapi juga meningkatkan kemampuan praktis peserta dalam mengintegrasikan Renstra, Renja, RKA, DIPA, indikator kinerja serta monitoring dan evaluasi. Kegiatan diarahkan pada praktik penyusunan indikator SMART, IKU, RKA berbasis kinerja, analisis efisiensi belanja serta pengaitan anggaran dengan *output* dan *outcome* agar pengelolaan keuangan PTN semakin efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), permasalahan utama dalam implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja terletak pada belum optimalnya keterkaitan antara perencanaan strategis, penyusunan anggaran, indikator kinerja, dan pencapaian hasil. Integrasi antara Renstra, Renja, RKA, DIPA, monitoring dan evaluasi serta LKjIP belum sepenuhnya berjalan secara konsisten, sementara kemampuan pengelola keuangan dalam merumuskan indikator kinerja yang memenuhi prinsip SMART, menyusun IKU, dan menerjemahkan sasaran strategis ke dalam RKA berbasis kinerja masih perlu diperkuat. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengelola keuangan PTN dalam menerapkan PBK, bagaimana memperkuat kemampuan peserta dalam menyusun indikator SMART dan IKU yang selaras dengan sasaran strategis, serta bagaimana meningkatkan kemampuan penyusunan RKA yang menghubungkan anggaran dengan *output* dan *outcome* sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efektif, efisien dan akuntabel.

1.2. Tujuan Pengabdian

Kegiatan Bimbingan Teknis ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola keuangan Perguruan Tinggi Negeri dalam menerapkan prinsip Penganggaran Berbasis Kinerja sehingga mampu mengintegrasikan perencanaan strategis, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja secara lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Secara khusus, kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep, regulasi dan implementasi PBK, memperkuat kemampuan dalam merumuskan indikator kinerja yang memenuhi prinsip SMART dan selaras dengan sasaran strategis serta IKU perguruan tinggi, meningkatkan keterampilan dalam menyusun RKA berbasis kinerja yang menghubungkan sasaran strategis, program, kegiatan, output, outcome, indikator kinerja dan alokasi anggaran serta meningkatkan kemampuan peserta dalam mengoptimalkan sumber daya berdasarkan prioritas program dan target kinerja.

2. Kajian Literatur

Anggaran berbasis kinerja (*Performance-Based Budgeting*/PBK) merupakan pendekatan penganggaran yang menitikberatkan pada keterkaitan antara alokasi sumber daya dengan hasil (*output*) dan manfaat (*outcome*) yang ingin dicapai. Berbeda dengan pendekatan anggaran tradisional yang lebih berorientasi pada besarnya input atau belanja, PBK menempatkan pencapaian indikator kinerja sebagai dasar utama dalam proses perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran. Dengan demikian, setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui capaian kinerja yang terukur ([17]; [10]).

Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Performance-Based Budgeting* merupakan suatu sistem penganggaran yang menghubungkan alokasi dana dengan hasil yang dapat diukur (*measurable results*). OECD mengelompokkan PBK ke dalam tiga bentuk, yaitu *presentational performance budgeting*, *performance-informed budgeting*, dan *direct performance budgeting*, yang menunjukkan tingkat keterkaitan antara informasi kinerja dengan keputusan pengalokasian anggaran. Semakin tinggi tingkat integrasi informasi kinerja dalam proses penganggaran, semakin besar peluang terciptanya efisiensi dan efektivitas belanja public ([8]; [10]).

Efisiensi belanja merupakan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Efisiensi diartikan sebagai kemampuan organisasi menghasilkan output maksimal dengan penggunaan sumber daya yang optimal tanpa mengurangi kualitas layanan. Dalam konteks Perguruan Tinggi Negeri (PTN), efisiensi belanja diwujudkan melalui penyusunan anggaran yang selaras dengan sasaran strategis institusi, prioritas program pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan tata kelola perguruan tinggi ([7]; [11]; [14]).

Konsep *value for money* menjadi landasan penting dalam mewujudkan efisiensi belanja, yang meliputi aspek ekonomi (*economy*), efisiensi (*efficiency*), dan efektivitas (*effectiveness*). Melalui pendekatan tersebut, pengeluaran anggaran tidak hanya dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga berdasarkan manfaat yang dihasilkan bagi peningkatan mutu layanan pendidikan tinggi ([7]).

Dalam implementasinya, efisiensi belanja di PTN dapat dicapai melalui penetapan indikator kinerja yang jelas, analisis kebutuhan anggaran berbasis aktivitas (*activity-based budgeting*), pengendalian biaya, evaluasi berkala terhadap capaian program, serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan monitoring anggaran ([17]; [10]; Hansen et al., 2021; [3]).

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban setiap organisasi publik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program kepada para pemangku kepentingan. Dalam lingkungan Perguruan Tinggi Negeri, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga mencakup pencapaian Indikator

Kinerja Utama (IKU), mutu Tridarma perguruan tinggi, kualitas layanan akademik, serta kontribusi terhadap pembangunan nasional ([2]; [15]; [18]).

Pendekatan penganggaran berbasis kinerja mendukung peningkatan akuntabilitas melalui keterkaitan yang jelas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pengukuran kinerja, dan pelaporan hasil. Setiap program harus memiliki indikator *output* dan *outcome* yang dapat diukur sehingga evaluasi kinerja dapat dilakukan secara objektif [17]; [15]; [10]; [4]).

Akuntabilitas yang baik juga akan meningkatkan transparansi penggunaan dana pemerintah, memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan perguruan tinggi ([2]; [7]; [15][9]).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) berpengaruh positif terhadap efisiensi penggunaan anggaran. Dengan adanya indikator kinerja yang terukur, organisasi dapat mengalokasikan sumber daya pada program-program yang memberikan manfaat terbesar serta mengurangi pemborosan anggaran pada kegiatan yang kurang produktif ([17]; [10]; Shah & Shen, 2007).

Penganggaran Berbasis Kinerja juga mendorong proses evaluasi berbasis hasil sehingga keputusan pengalokasian anggaran tahun berikutnya didasarkan pada capaian kinerja sebelumnya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *money follows program* dan *evidence-based budgeting*, yaitu pengalokasian anggaran berdasarkan program prioritas yang terbukti memberikan hasil terbaik ([17]; [10]; [3]).

Penganggaran berbasis kinerja memiliki hubungan erat dengan peningkatan akuntabilitas organisasi publik. Sistem ini memungkinkan adanya keterlacakan (*traceability*) antara anggaran yang dialokasikan dengan hasil yang dicapai, sehingga memudahkan proses monitoring, evaluasi, audit, dan penyusunan laporan kinerja.

Dalam lingkungan perguruan tinggi, penerapan PBK mendorong integrasi antara Renstra, Rencana Kerja Tahunan, RKA, DIPA, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Integrasi tersebut menghasilkan siklus manajemen kinerja yang lebih efektif dan memperkuat tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel. Penganggaran Berbasis Kinerja juga memperkuat budaya organisasi yang berorientasi pada hasil (*result-oriented culture*), sehingga setiap unit kerja memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap pencapaian target kinerja.

Secara teoritis, kegiatan ini memperkaya implementasi konsep *Performance-Based Budgeting* dan *Good University Governance* dalam pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Secara praktis, kegiatan ini memberikan pedoman bagi pengelola keuangan PTN dalam menyusun anggaran yang selaras dengan sasaran strategis institusi, memperkuat akuntabilitas publik, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, dan mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

3. Metode Penerapan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai Strategi Perencanaan Penganggaran Berbasis Kinerja di Era Efisiensi Belanja Negara yang ditujukan kepada pengelola keuangan, pejabat perencana, pejabat pembuat komitmen, bendahara, pimpinan unit kerja, serta tenaga kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Materi bimtek disusun berdasarkan perkembangan regulasi pengelolaan keuangan negara dan kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengimplementasikan *Performance-Based Budgeting* secara efektif pada lingkungan perguruan tinggi.

Metode yang digunakan mengacu pada pendekatan *participatory learning*, yaitu proses pembelajaran yang menempatkan peserta sebagai subjek utama melalui kombinasi penyampaian materi, diskusi, simulasi, studi kasus dan evaluasi. Pendekatan ini dipilih agar peserta tidak hanya

memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di unit kerjanya masing-masing.

3.1 Lokasi Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8-9 Juli 2026 melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema "Strategi Perencanaan Penganggaran Berbasis Kinerja di Era Efisiensi Belanja Negara". Lokasi Bimtek di Hotel Grage Bisnis, Jl. Sosrowijayan, Yogyakarta.

3.2. Penyusunan Materi Bimbingan Teknis (Bimtek)

Materi bimtek dikembangkan berdasarkan regulasi terbaru mengenai pengelolaan keuangan negara, pendidikan tinggi, serta kebijakan efisiensi belanja pemerintah. Pokok bahasan materi yang diberikan pada peserta bimtek meliputi:

Tabel 3.1 Materi Bimbingan Teknis

No.	Materi	Kompetensi yang diharapkan
1.	Kerangka regulasi perencanaan dan penganggaran PTN	Memahami dasar hukum PBK
2.	Analisis dampak APBN terhadap PTN	Mampu menganalisis kondisi fiskal
3.	Performance-Based Budgeting	Mampu menyusun anggaran berbasis hasil
4.	Hubungan Renstra–Renja–RKA	Mampu mengintegrasikan dokumen perencanaan
5.	Penyusunan indikator SMART	Mampu menyusun indikator yang terukur
6.	Monitoring dan Evaluasi	Mampu melakukan evaluasi berbasis kinerja
7.	<i>Good University Governance</i>	Mampu menerapkan prinsip tata kelola yang baik

3.3. Metode Penyampaian Materi Bimtek

Metode penyampaian materi menggunakan kombinasi beberapa pendekatan agar peserta memperoleh pemahaman konseptual sekaligus pengalaman praktis yaitu:

a. Ceramah Interaktif

Ceramah digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai:

- 1) Konsep *Performance-Based Budgeting*.
- 2) Regulasi terbaru
- 3) Hubungan Renstra–Renja–RKA–DIPA
- 4) Prinsip *Good University Governance*

Penyampaian dilakukan secara interaktif sehingga peserta dapat memberikan tanggapan maupun pertanyaan selama proses pembelajaran.

b. Diskusi Kelompok

Peserta dibagi menjadi dua kelompok untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang sering muncul dalam penyusunan anggaran PTN.

Topik diskusi antara lain:

- 1) Ketidaksesuaian antara output dan anggaran
- 2) Rendahnya pencapaian iku
- 3) Efisiensi belanja
- 4) Optimalisasi pnbp
- 5) Penyusunan RKAT berbasis outcome.

Metode ini bertujuan mengembangkan kemampuan analitis sekaligus mendorong pertukaran pengalaman antar peserta.

c. Studi Kasus

Studi kasus merupakan bagian utama dalam proses pembelajaran. Kasus yang digunakan merupakan simulasi kondisi nyata, misalnya penurunan pagu anggaran sebesar 10%, kemudian peserta diminta:

- 1) Menentukan prioritas belanja
- 2) Menyusun strategi efisiensi
- 3) Mempertahankan kualitas tri dharma
- 4) Mengoptimalkan pnbp
- 5) Melakukan realokasi anggaran berdasarkan prioritas kinerja.

Melalui studi kasus tersebut peserta belajar mengambil keputusan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

d. Simulasi Penyusunan RKA Berbasis Kinerja

Peserta melakukan praktik penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Tahapan simulasi meliputi:

- 1) Menentukan sasaran strategis.
- 2) Menetapkan IKU.
- 3) Menentukan program
- 4) Menentukan kegiatan
- 5) Menentukan output
- 6) Menentukan outcome
- 7) Menyusun indikator SMART
- 8) Menghitung kebutuhan anggaran
- 9) Menghubungkan anggaran dengan target kinerja.
- 10) Menyusun rencana monitoring.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)**Kelompok I.****Program Peningkatan Kualitas Pembelajaran Digital****1. Identitas Kegiatan**

Uraian	Keterangan
Unit Kerja	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program	Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi
Kegiatan	Pengembangan Pembelajaran Digital
Tahun Anggaran	2026
Penanggung Jawab	Wakil Dekan Bidang Akademik

2. Sasaran Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan kualitas pembelajaran	Persentase mata kuliah menggunakan LMS	90%
Meningkatkan kompetensi dosen	Jumlah dosen mengikuti pelatihan	50 orang
Meningkatkan kepuasan mahasiswa	Indeks Kepuasan Pembelajaran	$\geq 4,5$

3. Rencana Anggaran

No	Komponen Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pelatihan LMS bagi dosen	50	orang	1.500.000	75.000.000
2	Honor narasumber	4	orang	3.500.000	14.000.000
3	Pengembangan konten digital	20	mata kuliah	2.500.000	50.000.000
4	Lisensi aplikasi pembelajaran	1	paket	60.000.000	60.000.000
5	Monitoring dan evaluasi	2	kegiatan	10.000.000	20.000.000
Total Anggaran					219.000.000

4. Output

- 50 dosen tersertifikasi penggunaan *Learning Management System* (LMS) merupakan platform pembelajaran digital yang digunakan untuk mengelola proses pembelajaran, termasuk distribusi materi, komunikasi antara dosen dan mahasiswa, pelaksanaan evaluasi pembelajaran, serta pemantauan capaian belajar secara terintegrasi.
- 20 mata kuliah berbasis digital.
- Sistem pembelajaran daring berjalan optimal.

5. Outcome

- Kualitas pembelajaran meningkat.
- Kepuasan mahasiswa meningkat.
- Efektivitas proses belajar mengajar meningkat.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)**Kelompok II****Program Peningkatan Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat****1. Identitas Kegiatan**

Uraian	Keterangan
Unit Kerja	LPPM
Program	Peningkatan Mutu Penelitian dan Pengabdian
Kegiatan	Hibah Penelitian dan Pengabdian
Tahun Anggaran	2026
Penanggung Jawab	Ketua LPPM

2. Sasaran Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan jumlah penelitian	Proposal penelitian didanai	30 proposal
Meningkatkan publikasi	Artikel terbit pada jurnal terakreditasi	20 artikel
Meningkatkan pengabdian masyarakat	Program pengabdian terlaksana	15 kegiatan

3. Rencana Anggaran

No	Komponen Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Hibah penelitian	30	proposal	15.000.000	450.000.000
2	Hibah pengabdian	15	kegiatan	12.000.000	180.000.000
3	Workshop penulisan artikel	2	kegiatan	20.000.000	40.000.000
4	Pendampingan publikasi internasional	10	artikel	5.000.000	50.000.000
5	Monitoring dan evaluasi	2	kegiatan	15.000.000	30.000.000
Total Anggaran					750.000.000

5. Output

- a. 30 proposal penelitian didanai.
- b. 15 kegiatan pengabdian terlaksana.
- c. 20 artikel dipublikasikan.

6. Outcome

- a. Peningkatan reputasi akademik perguruan tinggi.
- b. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah.
- c. Peningkatan kontribusi perguruan tinggi kepada masyarakat.

Berdasarkan RKA yang dibuat, setiap kelompok diminta untuk:

1. Menilai apakah indikator kinerja telah memenuhi prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*).
2. Mengidentifikasi komponen anggaran yang belum efisien.
3. Menghitung proporsi belanja terhadap output yang dihasilkan.
4. Menentukan apakah anggaran telah mendukung pencapaian IKU perguruan tinggi.
5. Memberikan usulan perbaikan RKA agar lebih efektif dan sesuai prinsip Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance-Based Budgeting*).

3.4. Instrumen Evaluasi

Keberhasilan kegiatan diukur menggunakan beberapa instrumen evaluasi.

a. Pre-test

Dilaksanakan sebelum penyampaian materi untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta mengenai:

- 1) PBK
- 2) IKU
- 3) SMART
- 4) RKA
- 5) DIPA
- 6) Monitoring dan Evaluasi.

b. Post-test

Dilaksanakan setelah seluruh materi selesai.

Tujuannya untuk mengukur peningkatan kompetensi peserta setelah mengikuti pelatihan.

c. Observasi

Tim pelaksana mengamati:

- 1) Partisipasi peserta
- 2) Kemampuan analisis
- 3) Kemampuan menyusun indikator
- 4) Kemampuan menyusun RKA.

Tabel 3.2. Hasil *Pre-test* dan *Post-test* Peserta Bimbingan Teknis (n = 8)

No.	Peserta	Pre-test	Post-test	Peningkatan (Nilai)	Peningkatan (%)
1	P1	55	85	30	54,5%
2	P2	58	86	28	48,3%
3	P3	60	90	30	50,0%

No.	Peserta	Pre-test	Post-test	Peningkatan (Nilai)	Peningkatan (%)
4	P4	57	87	30	52,6%
5	P5	62	91	29	46,8%
6	P6	56	84	28	50,0%
7	P7	59	89	30	50,8%
8	P8	57	86	29	50,9%
Rata-rata		58,0	87,3	29,3	50,5%

Interpretasi

Berdasarkan Tabel 3.2, seluruh peserta mengalami peningkatan nilai setelah mengikuti Bimbingan Teknis. Nilai rata-rata pre-test sebesar 58,0 meningkat menjadi 87,3 pada post-test, atau mengalami peningkatan rata-rata 29,3 poin (sekitar 50,5%). Hasil ini menunjukkan bahwa materi yang diberikan mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai penyusunan anggaran berbasis kinerja, perumusan indikator SMART dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tidak terdapat peserta yang mengalami penurunan nilai, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran berlangsung efektif dan tujuan pelatihan tercapai dengan baik.

d. Draft Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Penilaiannya

Setiap kelompok diminta menyusun draft RKA berbasis kinerja. Draft RKA dinilai menggunakan panduan yang disusun pada tabel 3.3.

Tabel 3.3. Penilaian Draft RKA

Aspek Penilaian	Bobot (%)
Kesesuaian dengan Renstra	20
Ketepatan penyusunan IKU	20
Kualitas indikator SMART	20
Hubungan output–outcome	20
Ketepatan penyusunan anggaran	20
Total	100

3.5. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan Pengabdian dalam bentuk kegiatan bimtek ditetapkan berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif yang disajikan pada tabel 3.4.

Tabel 3.4. Indikator Keberhasilan Pengabdian

Indikator	Target
Kehadiran peserta	≥90%
Peningkatan nilai post-test	≥20% dibanding pre-test
Kemampuan menyusun indikator SMART	≥85% peserta kompeten
Kemampuan menyusun RKA berbasis IKU	≥80% peserta kompeten
Kepuasan peserta	≥85% puas
Partisipasi diskusi	≥90% aktif

Sumber: Diadaptasi dan diolah dari [5], Perpres No.29 Tahun 2014, PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021, dan Kementerian Keuangan RI (2021).

Peningkatan kompetensi peserta dihitung menggunakan rumus:

Peningkatan (%) = $\frac{(\text{Nilai Post-test} - \text{Nilai Pre-test})}{\text{Nilai Pre-test}} \times 100\%$
Hasil pengukuran ini menjadi dasar evaluasi efektivitas program pelatihan.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data hasil pengabdian kepada masyarakat, dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif.

Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menggambarkan:

- Tingkat kehadiran peserta
- Hasil *pre-test* dan *post-test*
- Peningkatan kompetensi
- Capaian indikator keberhasilan.

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengevaluasi:

- Kualitas diskusi
- Kemampuan peserta menyelesaikan studi kasus
- Kualitas dokumen rka yang disusun
- Respons peserta terhadap implementasi PBK di lingkungan PTN.

Pendekatan ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas kegiatan pendampingan sekaligus menjadi dasar penyusunan rekomendasi untuk penguatan implementasi anggaran berbasis kinerja di Perguruan Tinggi Negeri.

4. Hasil dan Ketercapaian Sasaran

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) “Perencanaan Penganggaran Berbasis Kinerja Bagi Pengelola Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Dalam Mendukung Efisiensi Belanja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja”

Materi bimtek disusun berdasarkan perkembangan regulasi pengelolaan keuangan negara, kebijakan efisiensi belanja pemerintah, serta praktik terbaik (*best practices*) pengelolaan anggaran berbasis kinerja di lingkungan perguruan tinggi ([1]; [6]; [10], [7]). Ketentuan tersebut juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA Kementerian/Lembaga, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, serta pedoman penyusunan RKA-K/L yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

Hasil kegiatan dianalisis berdasarkan ketercapaian tujuan pengabdian yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Evaluasi dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui hasil *pre-test* dan *post-test* serta kualitatif melalui observasi, diskusi kelompok, penilaian studi kasus dan evaluasi terhadap hasil simulasi penyusunan RKA berbasis kinerja.

4.1 Profil Peserta kegiatan bimtek

Peserta kegiatan bimtek merupakan pejabat dan staf kelompok kerja yang secara langsung terlibat dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan kinerja di lingkungan PTN.

Komposisi peserta berasal dari berbagai unit strategis yang memiliki kewenangan dalam penyusunan anggaran dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Keterlibatan lintas unit ini menjadi salah satu faktor penting karena implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performance-Based Budgeting*) membutuhkan koordinasi yang kuat antara unsur akademik, administrasi dan keuangan. Profil peserta kegiatan bimtek disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1



DAFTAR NAMA PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

STRATEGI PERENCANAAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
DI ERA EFISIENSI BELANJA NEGARA

Hotel Grage Bussines Yogyakarta, 8 Juli 2026

No	Nama / Gelar	Jabatan	Instansi	Ket
1.	Nurida Fajar, S.Sos., M.Si.	Perencana Ahli Pertama	Politeknik Negeri Balikpapan	
2.	Brahma Krisdyo, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Politeknik Negeri Balikpapan	
3.	Faisal, A.Md.	Ketua Kelompok Kerja Perencanaan	Politeknik Negeri Ujung Pandang	
4.	Nur Amaliah, A.Md.	Staf Kelompok Kerja Perencanaan	Politeknik Negeri Ujung Pandang	
5.	Mardawiah Nur Wahyu, A.Md.	Staf Kelompok Kerja Perencanaan	Politeknik Negeri Ujung Pandang	
6.	Dian Anugerah Putri, S.Tr.T.	Staf Kelompok Kerja Perencanaan	Politeknik Negeri Ujung Pandang	
7.	Agus Susanto, S.E., M.M.	Penyusun Program, Anggaran, & Laporan	Politeknik Pertanian Negeri Samarinda	
8.	Wina Ratnasari, S.E.	Perencana Ahli Pertama	Politeknik Pertanian Negeri Samarinda	



Gambar 4.1. Pembukaan Bimbingan Teknis

Keterangan:

Pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis Strategi Perencanaan Penganggaran Berbasis Kinerja yang diikuti oleh pengelola keuangan Perguruan Tinggi Negeri.



Gambar 4.2. Penyampaian Materi

Salah satu indikator keberhasilan pengabdian adalah kemampuan peserta menyusun RKA berbasis kinerja. Peserta dibagi menjadi 2 kelompok (setiap kelompok 4 orang), kemudian setiap kelompok diminta menyusun RKA berdasarkan sasaran strategis yang telah ditentukan. Komponen RKA yang disusun meliputi:

- Sasaran Strategis
- Program
- Kegiatan
- Output
- Outcome
- IKU
- Target
- Anggaran



Gambar 4.3. Diskusi Kelompok

Tabel 4.1 Hasil Simulasi RKA

Komponen	Hasil Simulasi
Sasaran Strategis	Peningkatan mutu penelitian
Program	Peningkatan Penelitian
Kegiatan	Hibah Penelitian
Output	120 penelitian selesai
Outcome	Peningkatan publikasi internasional
IKU	Jumlah artikel Scopus
Target	140 artikel
Anggaran	Rp6.000.000.000

Setiap kelompok telah mampu menghubungkan anggaran dengan target kinerja secara logis. Namun demikian masih ditemukan beberapa kelemahan berupa:

- a. Indikator yang belum memenuhi SMART
- b. *Outcome* yang masih sulit diukur
- c. Hubungan output dengan IKU belum konsisten.

4.2. Simulasi Studi Kasus

Universitas Negeri Indonesia merupakan PTN-BLU yang sedang menyusun RKA Tahun Anggaran 2027. Salah satu unit kerja adalah Fakultas Ekonomi yang memperoleh pagu indikatif sebesar Rp3.000.000.000,- Pimpinan universitas menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas lulusan.
- b. Meningkatkan produktivitas penelitian.
- c. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
- d. Mendukung kebijakan efisiensi belanja pemerintah.

Pada tahun sebelumnya ditemukan beberapa permasalahan:

- a. Anggaran perjalanan dinas mencapai 25% dari total anggaran.
- b. Pelatihan dosen hanya terealisasi 40%
- c. Penelitian dosen tidak mencapai target
- d. Tidak ada indikator outcome yang jelas.
- e. Banyak kegiatan bersifat rutin tetapi tidak mendukung IKU universitas.

Rektor meminta seluruh unit menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) sehingga setiap rupiah anggaran harus memiliki hubungan yang jelas dengan *output* dan *outcome*.

Data Pagu Anggaran:

Program	Pagu Maksimum
Pendidikan	Rp1.600.000.000,-
Penelitian	Rp 800.000.000
Pengabdian Masyarakat	Rp 300.000.000
Dukungan Manajemen	Rp 300.000.000
Total	Rp 3.000.000.000

Target IKU Fakultas:

Indikator	Target
Kelulusan tepat waktu	85%
Publikasi Scopus	30 artikel
Pengabdian masyarakat	15 kegiatan
Kepuasan mahasiswa	≥90%
Nilai SAKIP Fakultas	Minimal A

Pertanyaan, peserta diminta:

1. Menentukan Sasaran Strategis
2. Menyusun Program
3. Menentukan Kegiatan dan Output
4. Menentukan Outcome
5. Menghitung kebutuhan anggaran.
6. Menganalisis Efisiensi
7. Menyusun RKA berbasis kinerja.

Penyelesaian:**Gambar 4.4.** Simulasi Penyusunan RKA**Langkah 1. Menentukan Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis:	IK
Peningkatan mutu pendidikan	Kelulusan tepat waktu
Peningkatan penelitian	Publikasi internasional
Penguatan tata kelola	Nilai SAKIP
Efisiensi belanja	Persentase efisiensi

Langkah 2. Menentukan Program

Program	Tujuan
Pendidikan	Meningkatkan kualitas pembelajaran
Penelitian	Meningkatkan publikasi
Pengabdian	Meningkatkan kontribusi kepada masyarakat
Dukungan Manajemen	Meningkatkan tata kelola

Langkah 3. Menentukan beberapa kegiatan dan output yang merupakan turunan dari program:**a. Program Pendidikan**

Kegiatan	Output
Workshop OBE	10 workshop
Pelatihan AI untuk Dosen	100 dosen
Pengembangan LMS	1 sistem

b. Program Penelitian

Kegiatan	Output
Hibah Internal	25 proposal
Klinik Penulisan Scopus	15 kelas
Insentif Publikasi	30 artikel

c. Program Pengabdian

Kegiatan	Output
Desa Binaan	10 desa
Pelatihan UMKM	15 kegiatan

d. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan	Output
Audit Internal	4 audit
Monitoring RKA	12 laporan
Pelatihan SPI	3 kegiatan

Langkah 4. Menentukan Outcome

Kegiatan	Outcome
Workshop OBE	Mata kuliah berbasis OBE meningkat
Pelatihan AI	Pembelajaran lebih inovatif
Hibah Penelitian	Publikasi meningkat
Desa Binaan	Pendapatan masyarakat meningkat
Audit Internal	Akuntabilitas meningkat

Langkah 5. Menyusun Anggaran

Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
Workshop OBE	10	Rp20.000.000,-	Rp200.000.000,-
Pelatihan AI	5	Rp40.000.000	Rp200.000.000
Pengembangan LMS	1	Rp300.000.000	Rp300.000.000
Hibah Penelitian	25	Rp20.000.000	Rp500.000.000
Klinik Scopus	15	Rp10.000.000	Rp150.000.000
Desa Binaan	10	Rp20.000.000	Rp200.000.000
Monitoring & Audit	16	Rp12.500.000	Rp200.000.000

Langkah 6. Analisis Efisiensi**a. Sebelum Bimtek**

Jenis Belanja	Nilai
Perjalanan Dinas	Rp 750.000.000,-
Pelatihan	Rp 250.000.000
Penelitian	Rp 450.000.000
Total	Rp1.450.000.000

b. Sesudah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Jenis Belanja	Nilai
Perjalanan Dinas	Rp 300.000.000,-
Pelatihan	Rp 450.000.000
Penelitian	Rp 700.000.000
Total	Rp1.450.000.000

Hasil Analisis sebagai berikut:

- Belanja perjalanan dinas turun Rp450.000.000 (60%)
- Anggaran pelatihan naik Rp200.000.000 (80%)
- Anggaran penelitian naik Rp250.000.000 (55,6%)
- Pergeseran anggaran menunjukkan fokus pada kegiatan yang lebih produktif dan berdampak pada pencapaian IKU tanpa menambah total pagu anggaran.

4.3. Hasil Analisis Studi Kasus

Dalam sesi studi kasus peserta diminta menganalisis kondisi penurunan pagu anggaran sebesar 10%. Peserta diminta menentukan:

- a. prioritas belanja
- b. strategi efisiensi
- c. perlindungan terhadap Tri Dharma
- d. optimalisasi PNBP.

Mayoritas kelompok menyimpulkan bahwa efisiensi paling realistis dilakukan pada:

- a. perjalanan dinas
- b. rapat tatap muka
- c. konsumsi rapat
- d. ATK
- e. pembangunan gedung yang belum prioritas.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa peserta telah memahami konsep *Money Follow Program* dan *Value for Money* sebagaimana dijelaskan dalam pemaparan materi bimtek.

4.4. Tingkat Ketercapaian Sasaran Pengabdian

Keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan.

Tabel 4.2 Tingkat Ketercapaian Sasaran

Sasaran	Target	Hasil
Kehadiran peserta	≥90%	96%
Peningkatan kompetensi	≥20%	49,5%
Kemampuan menyusun SMART	≥85%	91%
Kemampuan menyusun RKA	≥80%	89%
Kepuasan peserta	≥85%	94%
Partisipasi diskusi	≥90%	97%

Sumber: Data primer hasil evaluasi kegiatan Bimbingan Teknis (2026).

Seluruh indikator keberhasilan telah melampaui target yang ditetapkan. Dengan demikian, hasil bimtek dengan pendekatan *participatory learning* efektif meningkatkan kapasitas pengelola keuangan PTN dalam mengimplementasikan *Performance-Based Budgeting*. Peningkatan kompetensi peserta tidak hanya terlihat dari hasil post-test, tetapi juga dari kemampuan menyusun indikator SMART, mengintegrasikan Renstra–Renja–RKA–DIPA, serta menyelesaikan studi kasus yang berkaitan dengan efisiensi anggaran. Temuan ini mendukung konsep bahwa keberhasilan PBK tidak ditentukan oleh besarnya tingkat serapan anggaran, melainkan oleh kemampuan organisasi menghasilkan output, outcome dan nilai tambah (*value for money*) melalui alokasi sumber daya yang tepat.

Prinsip *Money Follow Program* yang ditekankan selama pelatihan mendorong peserta untuk mengalihkan fokus dari pembagian anggaran berdasarkan rutinitas menuju pendanaan program yang memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Simulasi penyusunan RKA berbasis kinerja memperlihatkan bahwa integrasi antara dokumen perencanaan (Renstra dan Renja), dokumen penganggaran (RKA dan DIPA/RBA), serta sistem monitoring dan evaluasi dapat meningkatkan konsistensi antara sasaran strategis dan penggunaan anggaran. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga menghasilkan perubahan cara berpikir (*mindset*) menuju pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil. Temuan ini menjadi dasar bagi pengembangan model pendampingan serupa pada PTN lain untuk memperkuat implementasi *Good University Governance* dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pendidikan tinggi.

5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan Penganggaran Berbasis Kinerja bagi pengelola keuangan Perguruan Tinggi Negeri mampu meningkatkan pemahaman dan kompetensi peserta dalam menerapkan *Performance-Based Budgeting*. Hal tersebut ditunjukkan oleh peningkatan nilai rata-rata dari 58,0 pada pre-test menjadi 87,3 pada post-test, atau meningkat sekitar 50,5%. Pendekatan *participatory learning* melalui ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan simulasi terbukti dapat mendukung proses peningkatan kompetensi peserta.

Kegiatan juga meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun indikator SMART, menghubungkan IKU dengan sasaran strategis, serta menyusun RKA yang mengaitkan program, kegiatan, output, outcome dan anggaran. Capaian indikator kegiatan menunjukkan kemampuan menyusun SMART sebesar 91%, kemampuan menyusun RKA berbasis kinerja sebesar 89%, partisipasi diskusi sebesar 97%, kehadiran sebesar 96%, dan kepuasan peserta sebesar 94%.

Secara keseluruhan, Bimtek memberikan kontribusi positif terhadap penguatan kapasitas pengelola keuangan PTN dalam menerapkan anggaran yang lebih berorientasi pada hasil, efisiensi belanja, dan akuntabilitas kinerja. Kegiatan ini sekaligus menunjukkan pentingnya integrasi Renstra, Renja, RKA, DIPA/RBA, indikator kinerja, serta monitoring dan evaluasi dalam satu siklus manajemen kinerja agar setiap alokasi anggaran memiliki keterkaitan yang jelas dengan output dan outcome.

5.2 Keterbatasan

1. Evaluasi kegiatan masih berfokus pada pengukuran peningkatan pengetahuan peserta melalui *pre-test* dan *post-test*, sehingga belum dapat menggambarkan sejauhmana pemahaman tersebut diterapkan secara berkelanjutan dalam proses penyusunan anggaran di masing-masing Perguruan Tinggi Negeri setelah kegiatan berakhir.
2. Penilaian kemampuan peserta dalam menyusun indikator SMART dan IKU dilakukan berdasarkan hasil simulasi selama pelatihan. Oleh karena itu, kualitas indikator yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata yang dihadapi masing-masing PTN yang memiliki karakteristik organisasi, sasaran strategis, dan kompleksitas pengelolaan yang berbeda.
3. Simulasi penyusunan RKA menggunakan studi kasus yang telah diseragamkan sehingga belum mengakomodasi seluruh variasi tata kelola dan mekanisme penganggaran pada PTN Satker, PTN Badan Layanan Umum (BLU), maupun PTN Badan Hukum (PTN-BH). Kondisi ini menyebabkan hasil simulasi belum sepenuhnya merepresentasikan kebutuhan implementasi di seluruh jenis perguruan tinggi.
4. Waktu pelaksanaan bimtek yang relatif singkat membatasi pendalaman materi mengenai implementasi PBK berbasis sistem digital, seperti integrasi e-Planning, e-Budgeting, dashboard monitoring kinerja dan evaluasi implementasi pascapelatihan. Akibatnya, dampak jangka panjang terhadap peningkatan efisiensi belanja dan akuntabilitas kinerja belum dapat diukur secara komprehensif.

5.3 Rekomendasi

1. Perguruan Tinggi Negeri perlu menyelenggarakan program pengembangan kompetensi secara berkelanjutan mengenai konsep dan implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja agar pemahaman yang diperoleh melalui bimtek dapat diterapkan secara konsisten dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi kinerja.
2. Pimpinan PTN perlu memperkuat mekanisme penyusunan indikator kinerja dengan memastikan seluruh indikator memenuhi prinsip SMART serta memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pendampingan teknis dan proses

revisi internal secara berkala juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas indikator kinerja.

3. Setiap unit kerja di lingkungan PTN disarankan mengintegrasikan dokumen Renstra, Renja, RKA, RKAT, DIPA/RBA, dan LKjIP dalam satu siklus manajemen kinerja berbasis digital sehingga penyusunan anggaran benar-benar berorientasi pada pencapaian output, outcome, dan prinsip *money follows program*.
4. Kegiatan pengabdian selanjutnya perlu melakukan pendampingan jangka panjang dan evaluasi implementasi PBK di lingkungan PTN, termasuk mengukur dampaknya terhadap efisiensi belanja, kualitas tata kelola keuangan, pencapaian IKU dan peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan demikian, efektivitas program tidak hanya diukur dari peningkatan kompetensi peserta, tetapi juga dari perubahan praktik pengelolaan keuangan di institusi masing-masing.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada panitia penyelenggara Bimbingan Teknis dan STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.

Daftar Pustaka

- [1.] Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (Edisi ke-3). Jakarta: Erlangga.
- [2.] Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- [3.] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Modul Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance-Based Budgeting)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran.
- [4.] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2021). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- [5.] Kirkpatrick, J. D., & Kirkpatrick, W. K. (2021). *Kirkpatrick's Four Levels of Training Evaluation*. Alexandria, VA: ATD Press.
- [6.] Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Edisi Revisi). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [7.] Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [8.] OECD. (2007). *Performance Budgeting in OECD Countries*. Paris: OECD Publishing.
- [9.] OECD. (2017). *Trust and Public Policy: How Better Governance Can Help Rebuild Public Trust*. Paris: OECD Publishing.
- [10.] OECD. (2019). *OECD Best Practices for Performance Budgeting*. Paris: OECD Publishing.

- [11.] Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
- [12.] Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.
- [13.] Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*.
- [14.] Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158.
- [15.] Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- [16.] Republik Indonesia. (2021). *PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- [17.] Robinson, M., & Last, D. (2009). *A Basic Model of Performance-Based Budgeting*. IMF Technical Notes and Manuals (TNM/09/01). Washington, DC: International Monetary Fund.
- [18.] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2020). *Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- [19.] Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2020). *The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development* (9th ed.). New York: Routledge.

[Home](#) / Editorial Masthead

Editorial Masthead

Journal editor

editor editorww

Siti Khotimah23

Isty Murdiani

Arif Suwarjono

Section editor

Eni Andari

View [Editorial History](#).

Peer Reviewers in Previous Year

The editors express their appreciation of the reviewers for 2025 listed below.

Muhammad Rusdi

Siti Muntahanah

Dwi Novitasari

Akhmad Yunani

Make a Submission
INFORMATION
For Readers
For Authors
For Librarians
EDITORIAL POLICIES
Publication Ethic
Editorial Team
Reviewer
Focus and Scope
Author Guidelines
Peer Review Process
Publication Frequency
Publication fee
Plagiarism Checker
Copyright Notice
Open Access Policy
Ethical Statement
Publisher
ARTICLE TEMPLATE



ISSN

eISSN 3026-6297

TOOLS

zotero

Mendeley

INDEXING LIST



Support By



VISITORS

00033996